



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN
AKSES INTERNET DI WILAYAH *BLANK SPOT*
(STUDI KASUS DI KALURAHAN HARGOMULYO GUNUNGKIDUL)**

Gunawan Wibisono¹, Sri Widayanti²

Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa^{1,2}
e-mail: igoen6891@gmail.com

Diterima: 07/07/2026; Direvisi: 20/07/2026; Diterbitkan: 26/07/2026

ABSTRAK

Keterbatasan akses *internet* masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pemerataan pembangunan digital di wilayah *blank spot*, terutama pada daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi kendala tersebut akibat karakteristik topografi perbukitan, keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, serta belum meratanya kualitas jaringan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses *internet* di Kalurahan Hargomulyo menggunakan perspektif implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Penelitian menerapkan metode kualitatif dengan paradigma interpretif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik, ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan *internet* untuk pelayanan publik, pendidikan, komunikasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, pemerataan kualitas jaringan masih menghadapi kendala akibat kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dan belum optimalnya jangkauan layanan di beberapa wilayah. Keberhasilan implementasi kebijakan didukung oleh kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, BUMDes, penyedia layanan *internet*, dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sinergi antarpemangku kepentingan, pemerataan infrastruktur digital, serta peningkatan kualitas layanan *internet* menjadi faktor penting dalam mengurangi kesenjangan digital dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Infrastruktur Digital, Akses Internet, Wilayah Blank Spot.*

ABSTRACT

Limited *internet* access remains one of the primary challenges to achieving equitable digital development in *blank spot* areas, particularly in regions characterized by difficult geographical conditions. Hargomulyo Village, Gedangsari District, Gunungkidul Regency, is one such area that continues to face these challenges due to its hilly topography, inadequate telecommunications infrastructure, and uneven network coverage. This study aims to analyze the implementation of infrastructure development and *internet* access policies in Hargomulyo Village using Merilee S. Grindle's policy implementation framework, thereby providing empirical insights into the implementation of digital infrastructure policies in rural *blank spot* areas. This research employed a qualitative method with an interpretive paradigm. Data were collected through *in-depth interviews*, field observations, and documentation, and were





analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, which consists of data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that the policy implementation has generally been successful, as reflected in the increased utilization of the *internet* for public services, education, communication, and community economic activities. However, the equitable distribution of network quality remains constrained by geographical conditions, limited infrastructure, and the inadequate coverage of *internet* services in several areas. The successful implementation of the policy is supported by collaboration among the local government, village government, Village-Owned Enterprises (*BUMDes*), *internet* service providers, and the community. This study concludes that strengthening stakeholder collaboration, expanding digital infrastructure, and improving the quality of *internet* services are essential prerequisites for reducing the digital divide and promoting sustainable rural development.

Keywords: *Policy Implementation, Digital Infrastructure, Internet Access, Blank Spot Areas.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada era Revolusi Industri 4.0 telah mendorong perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama pada pola komunikasi, pelayanan publik, aktivitas ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan. Transformasi tersebut ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan *internet*, *cloud computing*, *artificial intelligence*, dan berbagai teknologi digital yang menjadi fondasi pembangunan di berbagai sektor. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur digital tidak lagi dipandang sebagai pelengkap pembangunan fisik, melainkan sebagai fondasi strategis yang memungkinkan terwujudnya transformasi digital yang berkelanjutan melalui penyediaan jaringan, platform, dan ekosistem teknologi yang mendukung inovasi serta kolaborasi lintas sektor (Chen et al., 2023; Mayyora et al., 2025; Irfan & Anirwan, 2024).

Meskipun perkembangan teknologi berlangsung sangat pesat, pemerataan akses digital di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antardaerah. Sebagian wilayah perkotaan telah menikmati layanan *internet* berkecepatan tinggi, sedangkan masyarakat di kawasan pedesaan maupun wilayah terpencil masih mengalami keterbatasan akses jaringan telekomunikasi. Kondisi tersebut mengakibatkan manfaat transformasi digital belum dapat dirasakan secara merata sehingga memengaruhi kualitas pelayanan publik, aktivitas ekonomi, serta akses masyarakat terhadap pendidikan dan informasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan akses digital masih menjadi salah satu faktor utama yang menghambat terwujudnya pembangunan desa berbasis digital. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), rendahnya kualitas konektivitas, serta belum meratanya akses internet di wilayah pedesaan menyebabkan implementasi kebijakan pemerataan infrastruktur telekomunikasi belum berjalan secara optimal di Indonesia (Ikbal et al., 2025; Susanti et al., 2023; Wahyudi dan Saputra, 2026; Harahap et al., 2025).

Pembangunan infrastruktur digital pada dasarnya merupakan bentuk intervensi kebijakan pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai tidak hanya mempermudah proses komunikasi, tetapi juga memperluas akses terhadap layanan



administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi berbasis digital. Dalam konteks pembangunan pedesaan, pengembangan infrastruktur digital perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas masyarakat melalui penguatan literasi digital agar teknologi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan jaringan dan infrastruktur teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas implementasi kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan desa, serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif dan berkelanjutan (Agusta, 2023; Izhari, 2024; Idrus et al., 2025; Irfan & Anirwan, 2024).

Permasalahan pembangunan infrastruktur digital menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada karakteristik wilayah yang masih tergolong *blank spot*. Wilayah dengan kondisi geografis yang berbukit, kepadatan permukiman yang rendah, serta keterbatasan infrastruktur pendukung sering kali mengalami hambatan dalam pembangunan jaringan telekomunikasi. Akibatnya, masyarakat tidak hanya mengalami keterbatasan akses informasi, tetapi juga kehilangan berbagai peluang sosial dan ekonomi yang berkembang melalui teknologi digital. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur pada wilayah *blank spot* memerlukan strategi implementasi kebijakan yang adaptif, dukungan teknologi yang sesuai dengan karakteristik wilayah, serta kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan telekomunikasi, dan masyarakat agar tujuan pemerataan akses *internet* dapat tercapai secara optimal (Azhari & Mukhaiyar, 2023; Muthi'ah et al., 2025; Dwiputra et al., 2025; Widjaja et al., 2026).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pengembangan infrastruktur digital dan pemerataan akses *internet* dari berbagai perspektif. Penelitian Irfan dan Anirwan (2024) serta Mayyora et al. (2025) lebih menitikberatkan pada transformasi digital desa sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, sedangkan Susanti et al. (2023) membahas strategi pengurangan kesenjangan digital melalui penerapan *Smart Village*. Penelitian lainnya lebih banyak mengulas aspek literasi digital masyarakat (Izhari, 2024; Idrus et al., 2025), pembangunan teknologi jaringan telekomunikasi (Dwiputra et al., 2025), maupun dampak infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi desa (Harahap et al., 2025). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada manfaat digitalisasi atau pengembangan teknologi, sehingga belum memberikan perhatian yang memadai terhadap bagaimana implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses *internet* berlangsung pada wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan (*blank spot*).

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur digital di wilayah *blank spot* masih memerlukan penguatan, terutama dalam memahami hubungan antara isi kebijakan, aktor pelaksana, ketersediaan sumber daya, serta kondisi lingkungan implementasi yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Padahal, keberhasilan pemerataan akses *internet* tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh koordinasi antarpemangku kepentingan, dukungan masyarakat, karakteristik wilayah, serta keberlanjutan program yang dijalankan. Penelitian mengenai layanan *internet* pada wilayah *blank spot* yang dilakukan Muthi'ah et al., (2025) menunjukkan pentingnya implementasi kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sementara penelitian Widjaja et al. (2026) memperlihatkan bahwa pendekatan spasial dapat membantu pemerintah menentukan prioritas pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Namun demikian, kajian yang secara komprehensif menganalisis implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses *internet* menggunakan



perspektif implementasi kebijakan Merilee S. Grindle pada tingkat kalurahan masih relatif terbatas.

Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik wilayah yang merepresentasikan tantangan pembangunan infrastruktur digital di kawasan perdesaan. Sebagian wilayah kalurahan masih menghadapi keterbatasan akses *internet* akibat kondisi topografi berbukit, sehingga kualitas layanan telekomunikasi belum sepenuhnya merata. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap akses digital terus meningkat seiring berkembangnya pelayanan pemerintahan berbasis elektronik, aktivitas pendidikan, pemasaran produk lokal, serta komunikasi sosial yang semakin bergantung pada teknologi digital. Kondisi tersebut menjadikan Kalurahan Hargomulyo sebagai lokasi yang relevan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses *internet* dijalankan dalam menghadapi berbagai tantangan geografis, kelembagaan, dan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses *internet* di wilayah *blank spot* menggunakan perspektif implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang menitikberatkan pada dimensi *content of policy* dan *context of implementation*. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi ketersediaan infrastruktur digital, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan pada tingkat lokal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya pada bidang transformasi digital di wilayah pedesaan, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pemerataan akses *internet* yang lebih efektif dan berkelanjutan. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses *internet* di wilayah *blank spot* pada Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma *interpretive* untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses *internet* di wilayah *blank spot* Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai proses implementasi kebijakan berdasarkan pengalaman, persepsi, dan interaksi para aktor yang terlibat. Informan penelitian dipilih secara *purposive* dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan, keterlibatan, dan kewenangan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses *internet*. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui telaah dokumen, seperti laporan, arsip, foto kegiatan, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan fokus penelitian].

Pengumpulan data dilakukan secara bertahap melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, observasi langsung terhadap kondisi infrastruktur telekomunikasi di lokasi penelitian, serta dokumentasi sebagai data pendukung. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing*



and verification). Pada tahap kondensasi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikelompokkan, serta disesuaikan dengan fokus penelitian berdasarkan dimensi implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis untuk memudahkan proses interpretasi, kemudian dilakukan verifikasi secara berulang hingga diperoleh kesimpulan yang konsisten dan didukung oleh bukti empiris.

Keabsahan data dijamin melalui penerapan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki peran berbeda dalam implementasi kebijakan, sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui pencocokan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga setiap temuan dapat saling menguatkan. Selain itu, proses analisis dilakukan secara berulang selama kegiatan penelitian untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tetap konsisten dengan kondisi empiris di lapangan. Melalui tahapan tersebut, data yang digunakan dalam penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas, konsistensi, dan validitas yang memadai sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses *internet* di wilayah *blank spot*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Kepentingan Kelompok Sasaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kalurahan Hargomulyo memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap akses *internet* sebagai sarana pendukung berbagai aktivitas sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara, *internet* dimanfaatkan untuk berkomunikasi, mengakses informasi, mendukung kegiatan pendidikan, menjalankan aktivitas ekonomi, serta memperoleh berbagai layanan administrasi pemerintahan. Meskipun jaringan *internet* telah tersedia, beberapa wilayah masih mengalami keterbatasan kualitas sinyal akibat kondisi geografis yang didominasi kawasan perbukitan. Ringkasan temuan penelitian pada aspek *content of policy* berdasarkan indikator implementasi kebijakan Merilee S. Grindle disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian pada Dimensi *Content of Policy*

Indikator	Temuan Penelitian
Kepentingan kelompok sasaran	Masyarakat membutuhkan akses <i>internet</i> untuk pendidikan, komunikasi, pelayanan administrasi, dan kegiatan ekonomi.
Jenis manfaat yang dihasilkan	Pemanfaatan <i>internet</i> mendukung pelayanan publik, kegiatan belajar, komunikasi, dan pengembangan usaha masyarakat.
Derajat perubahan yang diinginkan	Masyarakat mengharapkan pemerataan jaringan, peningkatan kualitas sinyal, serta perluasan akses <i>internet</i> hingga seluruh wilayah.
Kedudukan pembuat kebijakan	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Diskominfo berperan sebagai regulator dan fasilitator pengembangan infrastruktur <i>internet</i> .

Indikator	Temuan Penelitian
Pelaksana program	Pelaksanaan program melibatkan Diskominfo, Pemerintah Kalurahan, BUMDes, penyedia layanan <i>Internet Service Provider (ISP)</i> , dan masyarakat.
Sumber daya yang digunakan	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur didukung melalui pembiayaan APBD serta kerja sama dengan berbagai pihak.

Berdasarkan Tabel 1, setiap indikator pada dimensi *content of policy* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan, mulai dari kebutuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran hingga dukungan sumber daya dalam pelaksanaan program. Tabel tersebut menyajikan ringkasan hasil yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi selama penelitian berlangsung. Penyajian dalam bentuk tabel dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai hasil penelitian sebelum setiap indikator dijelaskan secara lebih rinci pada bagian berikutnya. Dengan demikian, pembaca dapat memahami hubungan antarindikator secara lebih sistematis.

Hasil wawancara dengan Lurah Kalurahan Hargomulyo menunjukkan bahwa akses *internet* di wilayah tersebut telah tersedia dengan kecepatan yang bervariasi sesuai lokasi dan penyedia layanan yang digunakan masyarakat. Berdasarkan informasi yang disampaikan, kecepatan *internet* rata-rata berkisar antara 10–20 Mbps untuk pengguna rumah tangga, meskipun pada beberapa titik masih ditemukan kondisi sinyal yang kurang stabil. Informasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan kualitas layanan antarwilayah di dalam Kalurahan Hargomulyo. Pernyataan informan tersebut disampaikan sebagai berikut. "*Di sini sudah terdapat akses internet dengan kecepatan internet bervariasi rata-rata sekitar 10–20 Mbps untuk pengguna rumahan, namun di beberapa titik sinyal tidak stabil.*" (Wawancara KI-2, 2025). Proses pengumpulan data melalui wawancara dengan Lurah Kalurahan Hargomulyo didokumentasikan sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Dokumentasi Wawancara dengan Lurah Kalurahan Hargomulyo

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, wawancara dilakukan secara langsung di Kantor Kalurahan Hargomulyo sebagai bagian dari proses pengumpulan data primer. Kegiatan wawancara dilaksanakan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur sehingga informan dapat menjelaskan kondisi pengembangan infrastruktur dan akses *internet*

berdasarkan pengalaman serta kewenangannya. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap kondisi lingkungan sekitar untuk memperoleh informasi pendukung yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dipadukan dengan hasil dokumentasi sebagai bagian dari proses triangulasi data.

2. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur dan akses *internet* di Kalurahan Hargomulyo melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi kebijakan dan pendampingan teknis, sedangkan Pemerintah Kalurahan berperan dalam koordinasi di tingkat lokal. Selain itu, BUMDes, penyedia layanan *Internet Service Provider (ISP)*, dan masyarakat turut terlibat dalam pelaksanaan program sesuai fungsi yang dimiliki. Ringkasan hasil triangulasi penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Triangulasi Temuan Penelitian

Aspek Temuan	Wawancara Observasi Dokumentasi		
Kebutuhan masyarakat terhadap akses <i>internet</i>	✓	✓	✓
Pemanfaatan <i>internet</i> untuk pelayanan publik	✓	✓	✓
Pemerataan kualitas jaringan	✓	✓	✓
Peran Diskominfo sebagai regulator	✓	–	✓
Keterlibatan Pemerintah Kalurahan dan BUMDes	✓	✓	✓
Dukungan pembiayaan dan pemeliharaan infrastruktur	✓	–	✓
Kolaborasi dengan penyedia layanan <i>ISP</i>	✓	✓	✓
Respons pemerintah terhadap aduan masyarakat	✓	✓	✓

Keterangan:

✓ = Data diperoleh pada teknik tersebut

– = Tidak ditemukan secara langsung pada teknik tersebut.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, seluruh temuan penelitian diperoleh melalui lebih dari satu teknik pengumpulan data. Hasil wawancara menjadi sumber utama informasi yang kemudian dilengkapi dengan observasi lapangan dan dokumentasi sesuai fokus penelitian. Penyajian matriks tersebut memperlihatkan bahwa setiap temuan didukung oleh data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data yang berbeda. Informasi tersebut disajikan sebagai gambaran mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian.

3. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Hargomulyo memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program pengembangan akses *internet* melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan pihak penyedia layanan. Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Kalurahan turut memfasilitasi penyampaian kebutuhan masyarakat terkait pengembangan jaringan kepada instansi yang berwenang. Di sisi lain, Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Gunungkidul secara berkala melakukan pemetaan terhadap wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses *internet*. Dokumentasi kegiatan wawancara dengan Kepala Bidang Layanan Informatika Diskominfo Kabupaten Gunungkidul disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Bidang Layanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul

Sebagaimana terlihat pada Gambar 2, proses wawancara dilakukan secara langsung menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses *internet*. Informasi yang diperoleh meliputi mekanisme penentuan prioritas pembangunan, bentuk pendampingan kepada pemerintah kalurahan, serta upaya pemetaan wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan. Selain menjadi sumber data primer, kegiatan tersebut juga didokumentasikan sebagai bagian dari proses penelitian. Dokumentasi tersebut melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan.

4. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Hargomulyo dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai kendala akses *internet* yang terjadi di lingkungan mereka. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat dapat melaporkan gangguan jaringan kepada pemerintah kalurahan atau penyedia layanan agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Selain menyampaikan laporan, masyarakat juga berpartisipasi dalam menjaga perangkat pendukung jaringan yang berada di lingkungan sekitar. Salah satu informan menyampaikan pernyataan sebagai berikut. "*Masyarakat berperan menjaga keamanan perangkat dan memberikan laporan cepat apabila terjadi gangguan koneksi.*" (Wawancara KI-1, 2025).

Selain informasi yang diperoleh melalui wawancara, hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa fasilitas pendukung akses *internet* telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas pelayanan maupun komunikasi. Dokumentasi yang diperoleh selama penelitian juga memperlihatkan adanya koordinasi antara pemerintah kalurahan dengan pihak terkait dalam mendukung penyelenggaraan layanan *internet*. Seluruh data tersebut dikumpulkan melalui tahapan wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai prosedur



penelitian yang telah ditetapkan. Penyajian hasil pada bagian ini menggambarkan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan tanpa memberikan interpretasi terhadap temuan penelitian.

Pembahasan

Implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses *internet* di Kalurahan Hargomulyo menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya program pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan tersebut menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dalam perspektif Merilee S. Grindle, dimensi *content of policy* menekankan bahwa isi kebijakan harus mampu mengakomodasi kepentingan kelompok sasaran agar memperoleh dukungan selama proses implementasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memandang akses *internet* sebagai kebutuhan yang semakin penting karena berkaitan dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan administrasi, dan komunikasi sehari-hari. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa orientasi kebijakan telah bergerak dari sekadar penyediaan infrastruktur menuju pemenuhan kebutuhan publik dalam mendukung transformasi digital di tingkat desa. Interpretasi ini sejalan dengan pandangan Garis (2025) bahwa implementasi kebijakan publik pada pembangunan desa harus diarahkan pada penyelesaian kebutuhan masyarakat secara nyata, serta didukung oleh transformasi digital yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik (Nashrullah et al., 2025).

Besarnya kebutuhan masyarakat terhadap akses *internet* juga menunjukkan adanya perubahan perilaku sosial sebagai konsekuensi berkembangnya teknologi digital. Masyarakat pedesaan tidak lagi memanfaatkan *internet* hanya sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana memperoleh informasi, mengakses layanan pemerintahan, mendukung proses belajar, dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari tersedianya jaringan telekomunikasi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu menciptakan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa transformasi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat pedesaan sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap layanan digital yang lebih merata (Sari & Diana, 2024). Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pada dimensi manfaat kebijakan (*benefit received*) tidak hanya tercermin pada pembangunan fisik, tetapi juga pada meningkatnya kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari.

Pada dimensi derajat perubahan yang diharapkan (*extent of change envisioned*), penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan akses *internet* yang stabil, merata, dan berkelanjutan, bukan sekadar tersedianya jaringan pada lokasi tertentu. Harapan tersebut mencerminkan bahwa masyarakat mulai menempatkan kualitas layanan digital sebagai bagian dari kebutuhan dasar dalam mendukung aktivitas sosial maupun ekonomi. Perspektif ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akan dinilai berhasil apabila mampu menghasilkan perubahan yang sesuai dengan ekspektasi kelompok sasaran, bukan hanya memenuhi target administratif pembangunan. Temuan tersebut sejalan dengan berbagai kajian yang menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital harus diikuti oleh peningkatan kualitas jaringan agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat pedesaan (Mulyono et al., 2024; Wang et al., 2025). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan perlu diukur berdasarkan keberlanjutan manfaat yang diterima masyarakat, bukan hanya melalui indikator penyediaan infrastruktur.



Selain substansi kebijakan, Grindle juga menekankan pentingnya kapasitas pelaksana dan ketersediaan sumber daya dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, BUMDes, masyarakat, dan penyedia layanan *internet* membentuk pola kolaborasi yang berkontribusi terhadap pelaksanaan program pengembangan infrastruktur digital. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara sektoral, melainkan memerlukan koordinasi antarpemangku kepentingan agar hambatan teknis maupun administratif dapat diminimalkan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada efektivitas koordinasi antaraktor serta kemampuan pemerintah membangun kemitraan dalam pembangunan desa (Dasnoer et al., 2023; Samhaji & Anggara, 2025). Di sisi lain, optimalisasi peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa juga berpotensi memperluas pemanfaatan teknologi digital melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha berbasis *digital marketing*, sehingga manfaat pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada penyediaan akses, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Widianingsih et al., 2026).

Pada dimensi *context of implementation*, lingkungan kebijakan menjadi faktor yang sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program pengembangan infrastruktur dan akses *internet*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, masyarakat, serta penyedia layanan telekomunikasi telah menciptakan lingkungan implementasi yang relatif kondusif. Namun demikian, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh adanya dukungan para pemangku kepentingan, melainkan juga oleh kemampuan mereka membangun koordinasi yang berkelanjutan dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh hubungan antaraktor, distribusi kewenangan, serta kemampuan institusi dalam merespons kebutuhan masyarakat. Pandangan tersebut memperkuat argumentasi Garis (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan desa bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat, sementara Dasnoer et al. (2023) menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif.

Meskipun implementasi kebijakan telah menunjukkan perkembangan yang positif, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kendala yang masih memengaruhi pemerataan akses *internet* di Kalurahan Hargomulyo. Kondisi geografis berupa kawasan perbukitan menyebabkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi memerlukan investasi yang lebih besar dibandingkan wilayah dengan topografi yang relatif datar. Selain itu, kualitas jaringan yang belum merata menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh jumlah fasilitas yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan jaringan memberikan layanan yang stabil kepada masyarakat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tantangan implementasi kebijakan pada wilayah *blank spot* memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan strategi pembangunan yang lebih adaptif dan berbasis kondisi lokal. Pemanfaatan teknologi jaringan yang lebih modern serta strategi penanggulangan wilayah *blank spot* menjadi alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan telekomunikasi di daerah pedesaan (Mulyono et al., 2024; Simbolon et al., 2025; Ahmmed et al., 2022).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur digital belum secara otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas pengguna. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kebutuhan



masyarakat terhadap pendampingan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan publik. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur *internet* perlu dipandang sebagai bagian dari proses pembangunan yang bersifat integratif, yaitu mengombinasikan pembangunan fisik dengan penguatan sumber daya manusia. Pengembangan literasi digital, peningkatan kemampuan penggunaan teknologi, serta optimalisasi peran kelembagaan desa menjadi faktor yang dapat memperluas manfaat pembangunan infrastruktur digital bagi masyarakat. Argumentasi tersebut didukung oleh Khodijah dan Harahap et al., (2025) yang menekankan pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat, serta Widianingsih et al. (2026) yang menunjukkan bahwa optimalisasi peran BUMDes mampu memperkuat pemanfaatan *digital marketing* dalam meningkatkan produktivitas usaha masyarakat desa.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses *internet* di Kalurahan Hargomulyo telah mengarah pada pencapaian tujuan kebijakan, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kondisi geografis, kapasitas kelembagaan, kualitas koordinasi, dan kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Berdasarkan perspektif Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas isi kebijakan (*content of policy*), tetapi juga oleh kemampuan lingkungan implementasi (*context of implementation*) dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara konsisten. Temuan ini memperluas penerapan teori implementasi kebijakan pada konteks pembangunan infrastruktur digital di wilayah *blank spot*, yang menunjukkan bahwa pemerataan akses *internet* memerlukan kombinasi antara pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, kolaborasi multipihak, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemerataan akses digital di wilayah pedesaan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kebijakan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah, sehingga transformasi digital dapat berlangsung secara lebih inklusif dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses *internet* di Kalurahan Hargomulyo telah berjalan dengan cukup baik melalui keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, BUMDes, penyedia layanan *Internet Service Provider (ISP)*, dan masyarakat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya infrastruktur digital, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan para aktor dalam membangun koordinasi, menyediakan sumber daya, dan merespons kebutuhan masyarakat pada wilayah yang memiliki karakteristik geografis berbukit. Meskipun akses *internet* telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan komunikasi, pendidikan, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi, pemerataan kualitas jaringan masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur digital di wilayah *blank spot* bergantung pada keterpaduan antara aspek kebijakan, kapasitas pelaksana, serta kondisi lingkungan implementasi yang saling mendukung.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa pengembangan infrastruktur digital di wilayah *blank spot* perlu diarahkan tidak hanya pada perluasan cakupan jaringan, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan, penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta pengembangan literasi digital masyarakat agar pemanfaatan *internet* dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan



bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini masih terbatas pada satu lokasi penelitian sehingga temuan yang diperoleh menggambarkan kondisi implementasi kebijakan pada konteks lokal tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah kajian atau menggunakan pendekatan *mixed methods* sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur dan akses *internet* pada berbagai karakteristik wilayah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Y. (2023). Managing The Development Of A Sustainable Digital Village. *Sustainability*, 15(9), 7575. <https://doi.org/10.3390/su15097575>
- Ahmmmed, T., Alidadi, A., Zhang, Z., Chaudhry, A. U., & Yanikomeroglu, H. (2022). The Digital Divide In Canada And The Role Of LEO Satellites In Bridging The Gap. *IEEE Communications Magazine*, 60(6), 24–30. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9800119>
- Azhari, A., & Mukhaiyar, R. (2023). Alat Pengukur Tinggi Badan Digital Untuk Daerah Blankspot Internet. *JTEIN: Jurnal Teknik Elektro Indonesia*, 4(1), 75–83. <https://doi.org/10.24036/jtein.v4i1.343>
- Chen, Y., Wang, Z., & Ortiz, J. (2023). A Sustainable Digital Ecosystem: Digital Servitization Transformation And Digital Infrastructure Support. *Sustainability*, 15(2), 1530. <https://doi.org/10.3390/su15021530>
- Dasnoer, H., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(16), 319–324. <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4763>
- Dwiputra, A. R., Maulana, D. A., Nurzamilah, Z., Pambudi, A. P., Narpulaela, L., & Andromeda, S. (2025). Peran *Fiber Optik* Dalam Revolusi Teknologi Jaringan Telekomunikasi. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(1), 1657–1663. <https://doi.org/10.36040/jati.v9i1.12280>
- Garis, R. R. (2025). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(4), 1561–1571. <https://doi.org/10.25157/moderat.v11i4.5866>
- Harahap, J., Susanti, S., Azizah, S. N., Nasution, A., & Hasibuan, M. (2025). Dampak Akses Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Desa Sibontar. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(6), 1207–1214. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/6599>
- Idrus, S. H., Jaya, L. M. G., Jabar, A. S., Nurfikria, I., & Lusianai, W. O. (2025). The Role Of Public Policy In Improving Digital Literacy In Rural Communities. *The Journal of Academic Science*, 2(6), 1697–1706. <https://thejoas.com/index.php/thejoas/article/view/409>
- Ikbal, M., Erfina, E., Lawelai, H., Lubis, S., & Darlis, M. A. (2025). Digital Transformation In Rural Areas: Directions For Digital Village Development In Developing Countries. *Journal of Public Sector Innovations*, 9(2), 58–72. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/38956>



- Irfan, B., & Anirwan, A. (2024). Explorasi implementasi digitalisasi desa: Studi literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v5i1.546>
- Izhari, F. (2024). Implementasi Program Peningkatan Literasi Digital Pada Masyarakat Pedesaan Melalui Workshop Komputer. *JIPITI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 30–36. <https://jipiti.technolabs.co.id/index.php/pkm/article/view/18>
- Khodijah, S., & Harahap, R. R. (2025). Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Melalui Pelatihan Dasar Komputer Dan Internet Di Desa Saentis. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (JURIBMAS)*, 3(3), 162–167. <https://doi.org/10.62712/juribmas.v3i3.316>
- Mayyora, R., Sholihah, Q., Wanusmawatie, I., & Wanto, A. H. (2025). Transformasi digital desa dan implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan: Pendekatan *literature review*. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 100–111. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v5i2.615>
- Mulyono, B., Rachman, A., Rahayu, N., Eldo, H., & Nuryanto, U. W. (2024). Analisis Dampak Implementasi Teknologi 5G Terhadap Infrastruktur Jaringan Di Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(2), 1462–1467.
- Nashrullah, M., Rahman, S., Majid, A., Hariyati, N., & Budiyo. (2025). Transformasi Digital Dalam Pendidikan Indonesia: Analisis Kebijakan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pembelajaran. *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 52–59. <https://doi.org/10.55352/mudir.v7i1.1290>
- Samhaji, S., & Anggara, F. D. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Pemerataan Akses Pendidikan Pada Daerah Tertinggal Indonesia. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 5(2), 99–112. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v5i2.839>
- Wahyudi, A. H., & Saputra, M. H. A. (2026). Perbandingan peran teknologi komputer dan akses internet pada interaksi sosial masyarakat perkotaan dan pedesaan di Indonesia: Tinjauan literatur. *ACCESS: Journal of Computer Science and Information Systems*, 3(1), 76–85. <https://doi.org/10.54373/access.v3i1.170>
- Sari, J. A., & Diana, B. A. (2024). Dampak Transformasi Digitalisasi Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(2), 88–96. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3896>
- Simbolon, E. W., Ndraha, H. N., Simanjorang, M., Pasaribu, F. E., & Damanik, J. A. Y. (2025). Upaya Atau Strategi Penanggulangan Sinyal *Blank Spot* Pada Sistem Komunikasi Seluler Di Desa Nalela Kecamatan Porsea. *Jurnal Kemitraan Masyarakat*, 2(1), 47–55. <https://doi.org/10.62383/jkm.v2i1.1304>
- Muthi'ah, S., Suriansyah, A., & Purwanti, R. (2025). Implementasi Kebijakan Program Layanan Internet Desa terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Sekolah Dasar Wilayah Blankspot. *Pedagogik Journal of Islamic Elementary School*, 8(1), 334–345. <https://doi.org/10.24256/pijies.v8i1.7033>
- Susanti, W. F., Jannatuzzahra, K., Kartika, A. D. P., & Mukaromah, S. (2023). Upaya dalam mengurangi kesenjangan digital pada penerapan smart village. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, 3(1), 334–343. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.336>
- Wang, Q., Ning, Z., & Tan, M. (2025). A Study On The Impact Of Digital Infrastructure Development On The Health Of Low-Income Rural Residents: Based On Panel Data From 2010 To 2022. *Frontiers in Public Health*, 13, Article 1503522. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1503522>



- Widianingsih, R., Nuha, A. U., Setianti, N., & Bawono, I. R. (2026). Penguatan Literasi Keuangan Dan Digital Marketing UMKM Desa Melalui Optimalisasi Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Kinerja Usaha: Studi Pada Desa Srowot, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(4), 26871–26876. <https://jerkin.org/index.php/jerkin/article/view/6510>
- Widjaja, I., Isnanto, R. R., Somantri, M., & Nuraya, S. N. (2026). Spatial Recommendation Model For Internet Infrastructure Needs In Indonesia Using GIS. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, 15(1), 95–102. <https://doi.org/10.32736/sisfokom.v15i01.2546>